

## Dampak Utang Luar Negeri Terhadap Pelaksanaan Politik Luar Negeri Indonesia Tahun 2014-2022

Asep Setiawan<sup>1,\*</sup>; Djoni Gunanto<sup>2</sup>; Hamka<sup>3</sup>; Yusuf Saputra<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta, Indonesia; asep.setiawan@umj.ac.id

<sup>2</sup> Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta, Indonesia; djoni.gunanto@umj.ac.id

<sup>3</sup> Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta, Indonesia; hamkaumj@gmail.com

<sup>4</sup> Universitas Muhammadiyah Jakarta, Jakarta, Indonesia; yusufsaputra654@gmail.com

\*Correspondence : asep.setiawan@umj.ac.id

### ABSTRAK

Sebuah negara yang sedang berkembang seperti Indonesia menumpuk utang luar negeri dikarenakan kurangnya tabungan dan investasi. Untuk mencapai tujuan menjaga dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia berutang sampai sekitar Rp. 7000 triliun sampai 2022. Politik luar negeri dikerahkan untuk mendapatkan pinjaman internasional melalui berbagai instrumen keuangan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji dampak utang luar negeri terhadap implementasi politik luar negeri Indonesia selama pemerintahan Joko Widodo dari tahun 2014-2022. Penelitian ini menggunakan konsep utang luar negeri, politik luar negeri, dan interdependensi kompleks. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan data yang dikumpulkan melalui wawancara pejabat pemerintah, akademisi dan serta studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan terdapat tiga bentuk politik luar negeri Indonesia dengan negara pemberi utang. Pertama, Indonesia menjalin hubungan positif dengan negara pemberi utang. Kedua, Indonesia menghindari terlibat dalam konflik dengan negara pemberi kredit dalam sejumlah masalah bilateral. Ketiga, Indonesia enggan menyampaikan kritik kepada negara kreditor yang terlibat masalah bilateral dan internasional. Dengan demikian secara umum implementasi politik luar negeri bebas aktif tidak dapat dijalankan secara maksimal karena adanya faktor ketergantungan kepada dunia internasional.

**Kata kunci:** *utang; dependensi; politik luar negeri; ekonomi; internasional*

### ABSTRACT

A developing country like Indonesia is accumulating foreign debt due to lack of savings and investment. To achieve the goal of maintaining and increasing economic growth, Indonesia owes up to around Rp. 7000 trillion until 2022. Foreign policy is mobilized to obtain international loans through various financial instruments. The purpose of this study is to examine the impact of foreign debt on the implementation of Indonesia's foreign policy during Joko Widodo's administration from 2014-2022. This study uses the concepts of

foreign debt, foreign policy, and complex interdependence. This study uses a qualitative approach, with data collected through interviews with government officials, academics and literature studies. The results of the study show that there are three forms of Indonesia's foreign policy with the debtor country. First, Indonesia maintains a positive relationship with creditor countries. Second, Indonesia avoids getting involved in conflicts with creditor countries in a number of bilateral matters. Third, Indonesia is reluctant to criticize creditor countries involved in bilateral and international issues. Therefore, in general, the implementation of a free and active foreign policy cannot be carried out optimally because of the dependency factor on the international community.

**Keywords:** *debt; dependence; foreign policy; economy; international*

## Pendahuluan

Indonesia menggunakan utang luar negeri sebagai salah satu instrumen dalam pembangunan nasional. Pemerintah Indonesia menyebutkan bahwa utang luar negeri ini antara lain untuk menjaga dan mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengembangkan pasar keuangan, menjaga momentum dan menghindari opportunity loss serta memberikan warisan aset untuk generasi mendatang (Agung, 2022).

Pemerintah Indonesia telah menghabiskan sebagian besar anggaran diantaranya dari utang luar negeri untuk pembangunan infrastruktur, yang merupakan tujuan utama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dana besar-besaran telah diarahkan untuk proyek-proyek skala besar seperti bandara, pelabuhan laut, sistem angkutan cepat massal, jalan tol, dan pembangkit listrik tenaga panas dan hidro. Belanja infrastruktur terus meningkat sekitar US\$10 miliar per tahun di bawah rencana anggaran Jokowi, hampir empat kali lipat dari pemerintahan sebelumnya. Jokowi juga memprioritaskan belanja di dua sektor ekonomi penting lainnya: pendidikan dan kesehatan (Agung, 2022).

Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam Statistik Utang Luar Negeri Indonesia (SULNI) edisi September 2022 mencatat bahwa posisi utang luar negeri Indonesia pada akhir Juli sebesar 400,4 miliar dolar AS. Jumlah ini turun dari bulan sebelumnya, yakni 403,6 miliar dolar AS. Tren penurunan tersebut terjadi dipengaruhi oleh penurunan utang luar negeri sektor publik, yaitu pemerintah dan bank sentral, serta sektor swasta.

Sejak 2014, utang Indonesia meningkat di bawah Presiden Joko Widodo. Utang luar negeri Indonesia mencapai Rp 2.608,78 triliun pada 2014. Utang Indonesia mencapai Rp 4.779,28 miliar pada akhir pemerintahan pertama Jokowi pada 2019 (Hardiantoro:2022).

Posisi utang luar negeri pemerintah pada Juli 2022 tercatat menurun menjadi 185,6 miliar dolar AS, lebih rendah dibandingkan dengan posisi Juni 187,3 miliar dolar AS. Sementara itu, utang luar negeri sektor swasta pada Juli 2022 tercatat sebesar 206,3 miliar dolar AS. Angka ini turun dibandingkan posisi bulan sebelumnya, sebesar 207,7 miliar dolar AS. Berdasarkan Statistik Utang Luar Negeri

Indonesia edisi September 2022, setidaknya ada 21 negara yang saat ini memberikan pinjaman untuk Indonesia.

Berbagai kajian mengenai implementasi politik luar negeri bebas aktif menekankan kepada prinsip dasar yang dianut sesuai dengan landasan konstitusional. Kajian Santoso dan Marnani (2020) menyimpulkan bahwa politik luar negeri bebas dan aktif tidak lepas dari kemampuan pertahanan yang masih belum mencapai minimum *essential force*. Oleh sebab itulah Indonesia membentuk *Strategic Partnership* dengan negara besar. Jauh sebelumnya, Rizal Sukma (1997) menyebutkan bahwa adanya kesepakatan keamanan Indonesia dan Australia bahwa Indonesia memerlukan reformulasi interpretasi formal yang lebih luas, lebih fleksibel dan pragmatis politik luar negeri bebas aktif.

Rafikasari (2020) menilai bahwa relevansi politik luar negeri bebas aktif perlu secara temporer disisihkan dalam rangka mewujudkan kepentingan seperti dalam kasus Indonesia-China Alliance dalam pengembangan teknologi angkasa luar. Sedangkan Setiawan, Sulastri dan Sumarno (2018) menyebutkan politik luar negeri Jokowi menempatkan perlindungan warga negara sebagai salah satu prioritas. Dengan istilah politik luar negeri pro-rakyat, Indonesia menaruh perhatian terhadap perlindungan pekerja migran Indonesia misalnya di Malaysia. Namun pada umumnya implementasi politik luar negeri di bawah Presiden Joko Widodo beberapa akademisi menyebutkan orientasi politik luar negeri ke dalam negeri (Rosyidin, 2020; Weatherbee, 2016).

Relasi antara utang luar negeri dengan politik luar negeri bebas aktif dapat dikatakan belum berkembang pesat. Namun studi tentang ketergantungan terhadap luar negeri termasuk dalam bentuk investasi dan juga pinjaman menjadi perhatian sejumlah pakar. Rachman (2020) menyebutkan Presiden Zimbabwe Robert Mugabe tahun 2015 secara resmi menyatakan bahwa Zimbabwe akan menasionalisasi Yuan sebagai mata uang nasional resmi. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi default terhadap utang Zimbabwe ke China.

Maitra, B. (2019) berpendapat bahwa Akumulasi utang publik di Sri Lanka meningkat secara signifikan sejak kemerdekaan. Utangnya melebihi 100% dari produk domestik bruto (PDB) pada akhir 1980-an dan awal 2000-an. Akibat utang berlebihan itulah maka Sri Lanka menjadi salah satu contoh negara bangkrut karena tidak dapat membayar utangnya. Sementara Ifeoma, Ezeabasili E. (2011) dalam kajiannya menyatakan bahwa berkurangnya utang luar negeri akan merevitalisasi negara itu citra dari negara miskin dan paria menjadi negara berdaulat yang kredibel dan rajin. Ini juga akan memulihkan kepercayaan negara dalam partisipasi dan pengaruh isu-isu di kancah internasional.

Groenewoud, S.M. (2022) menemukan bahwa bagaimana perubahan politik dalam negeri Yunani berinteraksi dengan meningkatnya antipati terhadap Uni Eropa, yang mengarah pada ekspresi de-Europeanisasi kebijakan luar negeri dan peningkatan kerja sama dengan China. Portugal juga meningkatkan kerja samanya dengan China, tetapi penentangannya terhadap Uni Eropa lebih moderat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dampak utang luar negeri Indonesia terhadap pelaksanaan politik luar negeri, termasuk pelaksanaan politik luar negeri

bebas dan aktif pada masa pemerintahan Joko Widodo 2014-2022. Bagaimana bentuk politik luar negeri dengan berbagai negara pemberi utang dikaitkan dengan prinsip bahwa Indonesia menganut politik luar negeri bebas aktif.

### Utang Luar Negeri

Alasan negara-negara sedang berkembang menimbun utang luar negeri adalah kurangnya tabungan dan investasi (Chenery dan Strout, 1966). Menurut Gohar (2012) alasan lainnya adalah pendapatan pemerintah rendah, tingkat investasi rendah, dan defisit anggaran berimbang. Negara dengan tabungan yang tidak cukup maka tidak ada jalan lain kemudian meminjam ke pihak luar negeri baik negara maupun lembaga keuangan internasional.

Dilihat dari jenisnya, utang luar negeri dapat dikategorikan menjadi tiga bagian.

1. Dana pembangunan resmi adalah pinjaman resmi lunak dengan persyaratan yang biasanya diberikan kepada negara berkembang melalui kerja sama bilateral atau dengan bantuan organisasi internasional seperti Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia.
2. Kredit Ekspor adalah pembiayaan melalui investasi dan modal yang berasal dari valuta asing atau Rupiah. Bantuan kredit ini dikirim ke negara-negara bantuan dan eksportir. Biasanya, kredit ekspor bantuan luar negeri ini ditujukan untuk meningkatkan ekspor pemerintah atau perusahaan swasta.
3. Pinjaman Swasta adalah pinjaman atau pinjaman dari bank swasta asing yang bersifat komersial. Berbagai bentuk pinjaman swasta ini dapat digunakan untuk meningkatkan ekspor dan menjadi obligasi atau sekuritas yang dibeli oleh orang asing.

Utang luar negeri ini dilunasi dengan cara yang sama seperti pinjaman yang diberikan. Jenis hibah pertama biasanya merupakan pengembalian yang lambat dalam jangka waktu yang lama. Sedangkan jenis yang kedua adalah pinjaman luar negeri (pinjaman), syaratnya umumnya lebih ketat dan lebih terkait dengan bisnis (Catur, 2012).

Pertimbangan non ekonomi seperti politik dan keamanan termasuk dalam syarat pemberian bantuan ekonomi berupa utang. Negara-negara kaya menggunakan instrumen bantuan luar negeri ini, termasuk utang untuk mengintervensi negara-negara lemah (Dietrich, 2021). Negara-negara maju juga membantu dengan memiliki hubungan diplomatik. Sementara itu, negara-negara yang berbeda pandangan politik atau tidak memiliki hubungan diplomatik jarang melakukan kerjasama dalam pinjam meminjam dana. Hal ini karena bantuan keuangan dan lainnya seperti diplomasi, propaganda, dan aksi militer merupakan bagian dari instrumen suatu negara dalam kepentingannya (Picard dan Groelsema, 2015).

### Politik Luar Negeri

Columbus (1986) mengutip Cecil Crabb bahwa politik terdiri dari dua unsur yakni tujuan nasional untuk dicapai dan cara untuk mencapainya. Interaksi

antara tindakan antara tujuan nasional dan sumber daya untuk mencapainya merupakan masalah abadi. Rosenau (1976) menyebutkan terdapat tiga pengertian mengenai politik luar negeri.

- a. Politik luar negeri sebagai seperangkat orientasi (as a group of orientation). Kebijakan luar negeri sebagai seperangkat orientasi memandu para pembuat keputusan untuk menghadapi kondisi eksternal yang menuntut pengambilan keputusan dan tindakan berdasarkan orientasi tersebut. Orientasi ini terdiri dari sikap, persepsi, dan nilai yang dijabarkan dari pengalaman sejarah dan keadaan strategis yang menentukan posisi negara dalam politik internasional.
- b. b. Politik luar negeri sebagai seperangkat komitmen dan rencana untuk bertindak (as a set of commitments and a plan for action). Dalam hal ini, politik luar negeri berupa rencana dan komitmen konkrit yang dikembangkan oleh para pengambil keputusan untuk membina dan memelihara situasi lingkungan eksternal yang konsisten dengan orientasi politik luar negeri. Rencana aksi ini mencakup tujuan khusus dan alat atau cara untuk mencapainya yang dianggap cukup untuk mengatasi peluang atau tantangan dari luar negeri.
- c. Politik luar negeri sebagai bentuk tingkah laku atau tindakan (as a form of behavior). Pada tataran ini kebijakan luar negeri berada pada tataran yang lebih empiris, yaitu berupa langkah-langkah konkrit yang diambil oleh para pengambil keputusan terkait dengan peristiwa dan situasi di lingkungan eksternal.

Sedangkan tujuan politik luar negeri terbagi tiga yakni pertama, keputusan yang terprogram yakni keputusan yang memiliki konsekuensi jangka panjang. Kedua, keputusan yang terkait keputusan-keputusan saat krisis yaitu selama periode gawat, terbatas waktu dalam meresponsnya dan unsur kejutan yang memerlukan respons sementara. Ketiga, tujuan taktis yakni keputusan penting yang biasanya turunan dari tingkat program (Columbus, 1986).

Studi akademis yang meneliti hubungan antara ketergantungan ekonomi dan kebijakan luar negeri menunjukkan bahwa banyak perilaku kebijakan luar negeri bergantung secara berbeda. Terdapat lima jenis kebijakan luar negeri: kepatuhan, konsensus, kontra-ketergantungan, kompensasi, dan independensi (Hey, 1993).

- a. Penyelarasan kebijakan luar negeri: kepatuhan dan konsensus. Diperkirakan negara Dunia Ketiga akan bersekutu dengan kekuatan besar yang berada di bawahnya karena kerentanan politik dan ekonominya. Kepatuhan dan konsensus, dua gaya kebijakan luar negeri yang dibahas di sini, sepakat bahwa keputusan kebijakan luar negeri negara-negara bergantung akan diselaraskan dengan keputusan inti mereka.
- b. Divergensi kebijakan luar negeri: melawan ketergantungan dan kompensasi. Negara-negara yang bergantung secara ekonomi sering gagal mengikuti contoh inti dan secara aktif mengejar kebijakan luar negeri yang secara langsung bertentangan atau menentang tujuan hegemon. Menurut konsep kontra-ketergantungan, kebijakan luar negeri anti-inti digunakan oleh pembuat kebijakan di Dunia Ketiga yang tidak setuju dengan dampak

merugikan secara politik dan ekonomi dari hubungan ketergantungan. Sebaliknya, proses kompensasi dilakukan oleh pemerintah yang tidak dengan keras menolak hubungan ekonomi dengan inti tetapi dipaksa untuk mengatasi keraguan publik yang ditimbulkan oleh hubungan tersebut. Untuk meredakan konflik dalam negeri yang datang dengan hubungan ketergantungan, kebijakan luar negeri anti-inti digunakan.

- c. kemandirian kebijakan luar negeri. Di sini, politik luar negeri yang mandiri adalah politik yang berkembang dengan sendirinya sebagai akibat dari ketergantungan suatu negara terhadap negara lain. Perjanjian persahabatan atau kerja sama dengan negara tetangga, kunjungan resmi antara pemimpin yang bersahabat, dan undang-undang yang mendukung cita-cita internasional seperti hak asasi manusia atau perlindungan lingkungan global adalah beberapa contoh yang terlintas dalam pikiran. Kebijakan luar negeri pro-inti atau anti-inti dapat diadopsi secara independen.

### Interdependensi

Penelitian ini juga terkait dengan teori Interdependensi Kompleks. Karya Keohane dan Nye (1977) ini terkait erat dengan teori Interdependensi Kompleks. Hubungan antar negara, trans-pemerintah, dan transnasional adalah beberapa aspek dari Interdependensi Kompleks yang dijelaskan oleh Keohane dan Nye (1977).

Sementara realis dan neorealis mulai dengan asumsi bahwa saluran penghubung dalam politik dunia, menurut definisi, adalah antar negara, agenda hubungan antar negara terdiri dari banyak tema yang tidak selalu jelas hierarkis. Oleh karena itu, Keohane dan Nye berargumen bahwa "Masalah yang berbeda menghasilkan koalisi yang berbeda, baik dalam kerangka tata kelola maupun melintang ke mereka dan melibatkan tingkat konflik yang berbeda." Demikian pula, dalam Interdependensi Kompleks dinyatakan bahwa "negara-negara yang kurang rentan akan mencoba menggunakan saling ketergantungan asimetris dalam beberapa kelompok masalah tertentu sebagai sumber kekuatan."

Di luar perspektif realis, teori ini menghadirkan cara alternatif untuk menafsirkan perilaku negara dalam politik internasional. Namun, mereka tidak sepenuhnya meninggalkan pendekatan realis, dengan alasan bahwa saling ketergantungan yang lebih kompleks akan menghadirkan realitas yang lebih baik daripada perspektif realis.

Menurut Keohane dan Nye (1977), "ketergantungan" adalah keadaan yang ditentukan atau sangat dipengaruhi oleh peristiwa atau kekuatan eksternal, sedangkan interdependensi adalah keadaan saling ketergantungan. Mereka mengatakan bahwa dampak timbal balik antar negara atau pemain di berbagai negara menentukan hubungan timbal balik global.

Berbeda dengan kaum realis yang memandang negara sebagai satu-satunya aktor dalam politik internasional dan mengklaim bahwa *power* atau kekuasaan merupakan instrumen penting bagi kelangsungan hidup suatu negara, kaum realis lebih mengutamakan kekuatan militer di atas segalanya. Menurut ahli teori

Interdependensi Kompleks, penekanannya ada pada berbagai cara pemain transnasional menjadi saling bergantung, rentan, dan peka terhadap kebutuhan satu sama lain.

Sejak tahun 1970-an, interdependensi juga menggambarkan dinamika pergeseran dalam hubungan negara. Meningkatnya interaksi sosial, ekonomi, dan politik merupakan salah satu unsur paling menonjol yang mempengaruhi penggunaan frasa ini. Berbeda dengan realisme, yang menekankan keamanan, saling ketergantungan kompleks liberal menekankan kepentingan relatif dari masalah ekonomi.

Akibatnya, kekuatan militer tidak dapat dianggap sebagai satu-satunya penyebab hubungan negara. Di hadapan dinamika yang kompleks, negara-negara berinteraksi satu sama lain (Holsti, 1992). Namun, pendekatan ini mengabaikan interpretasi hierarkis. Ada lebih banyak masalah dari itu. Otoritas negara, pedagang, investor, hubungan transnasional, kekuatan domestik, dan konsumen semuanya terlibat dalam hubungan yang rumit. Pencitraan semacam ini menumbuhkan saling pengertian atau kerja sama. Kenaikan tingkat perdagangan menghasilkan lebih banyak pertemuan dan, sebagai hasilnya, hasil yang lebih menguntungkan. Akibatnya, konsep realis tentang posisi negara kesatuan dan struktur hierarki dunia tidak sesuai dengan kerangka yang berlaku saat ini.

Namun, berkonsentrasi pada proses ekonomi tidak boleh dipahami sebagai mengabaikan pertimbangan politik, seperti yang dijelaskan oleh Keohane dan Nye (1977). Sebaliknya, dikatakan bahwa saling ketergantungan ekonomi yang lebih besar mengarah pada peningkatan saling ketergantungan politik karena ada hubungan struktural di antara mereka.

### Metode Penelitian

Pendekatan kualitatif digunakan untuk mempelajari dampak utang luar negeri Indonesia terhadap pelaksanaan politik luar negeri. Penelitian kualitatif adalah metode untuk menyelidiki dan memahami perilaku individu atau kelompok tentang masalah sosial dan manusia. Dalam teknik kualitatif ini, peneliti menginterpretasikan apa yang dilihat, didengar, dan dipahaminya (Creswell, 2014). Lamont (2015) mengatakan bahwa penelitian kualitatif ini berarti peneliti mengumpulkan dan menganalisis data yang bersifat non-numerik sambil lebih memahami lingkungan internasional di mana peristiwa itu terjadi.

Pemilihan metode ini memberi arti pada peristiwa yang menjadi objek penelitian Metode ini memberikan data yang kaya dan deskriptif yang diperlukan untuk menginterpretasikan melalui identifikasi dan pengkodean tema dan kategori yang ada yang mengarah pada temuan yang akan memberikan kontribusi pada pengetahuan teoritis dan praktis gunakan (Boeije, 2010).

Data yang diperlukan untuk penelitian ini meliputi data primer berupa wawancara dengan pejabat pemerintah, akademisi, dan peneliti. Sedangkan data sekunder berupa dokumen dan informasi dikumpulkan dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Data

sekunder lainnya berasal dari lembaga penelitian, think tank, situs media siber, hasil survei, statistik, tabel, grafik, dan arsip lainnya.

## Hasil dan Pembahasan

Utang luar negeri Indonesia telah digunakan untuk membangun infrastruktur sejak Presiden Joko Widodo menjabat sebagai Presiden Indonesia pada tahun 2014. Saat Jokowi berkuasa pada tahun 2014, ia mewarisi utang sebesar US\$122 miliar dari pendahulunya, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Setelah empat tahun, utang meningkat 48 persen menjadi US\$181 miliar. Kenaikan tersebut signifikan, mengingat utang naik 26 persen di bawah lima tahun pemerintahan SBY dari 2009 hingga 2013. Sementara itu, rasio utang terhadap D tumbuh dari 24,7 persen menjadi 30 persen antara 2014 dan 2018. Namun, jumlah ini lebih rendah dari batas 60 persen pengelolaan utang di Indonesia.

Pemerintah Indonesia menyebutkan bahwa utang luar negeri ini untuk menjaga dan mempercepat pertumbuhan ekonomi, mengembangkan pasar keuangan, menjaga momentum, menghindari hilangnya kesempatan, dan memberikan warisan aset bagi generasi mendatang (Agung, 2022).

Pemerintah Indonesia menghabiskan sebagian besar anggarannya untuk utang luar negeri untuk pembangunan infrastruktur, yang menjadi tujuan utama pemerintahan Jokowi. Dana besar-besaran telah diarahkan ke proyek-proyek skala besar seperti bandara, pelabuhan laut, sistem mass rapid transit, jalan tol, dan pembangkit listrik tenaga panas dan air. Belanja infrastruktur terus meningkat sekitar US\$10 miliar per tahun di bawah rencana anggaran Jokowi, hampir empat kali lipat dari pemerintahan sebelumnya. Jokowi juga memprioritaskan belanja di dua sektor ekonomi penting lainnya: pendidikan dan kesehatan.

Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan dalam Statistik Utang Luar Negeri Indonesia edisi September 2022 mencatat posisi ULN Indonesia pada akhir Juli sebesar USD 400,4 miliar. Jumlah ini turun dari bulan sebelumnya yang sebesar USD 403,6 miliar. Tren penurunan tersebut dipengaruhi oleh penurunan utang luar negeri di sektor publik yaitu pemerintah dan bank sentral serta sektor swasta.

Posisi ULN pemerintah pada Juli 2022 turun menjadi USD 185,6 miliar, lebih rendah dibandingkan posisi Juni sebesar USD 187,3 miliar. Sedangkan ULN sektor swasta pada Juli 2022 tercatat sebesar USD 206,3 miliar. Angka tersebut turun dibandingkan posisi bulan sebelumnya, yaitu sebesar USD 207,7 miliar. Berdasarkan Statistik Utang Luar Negeri Indonesia edisi September 2022, saat ini setidaknya ada 21 negara yang memberikan pinjaman kepada Indonesia.

Untuk memahami hubungan utang luar negeri Indonesia dengan hubungan luar negeri Indonesia dapat dilihat dari data yang tersedia mengenai negara-negara yang memberikan pinjaman kepada Indonesia. Setidaknya delapan negara telah memberikan pinjaman kepada Indonesia per Juli 2022 (Princess, 2022).

1) Singapura USD 60.076 miliar 2) Amerika Serikat USD 33.527 miliar 3) Jepang USD 25.485 miliar 4) China USD 20.839 miliar 5) Hong Kong USD 17.634 miliar 6) Korea Selatan USD 6.408 miliar 7) Jerman USD 5.476 miliar, 8) Belanda USD 5.210 miliar.



Dengan utang luar negeri Indonesia ke beberapa negara di Asia, Eropa, dan Amerika Serikat, Indonesia beradaptasi dalam pelaksanaan hubungan luar negerinya. Adaptasi ini lebih merupakan kebijakan fleksibel yang tidak menekankan kekakuan yang terlihat, misalnya dalam hubungan Indonesia dengan China.

Dampak pertama utang luar negeri terhadap politik luar negeri secara umum adalah hubungan Indonesia dengan negara-negara pemberi pinjaman kepada Indonesia berjalan positif. Pemerintah Indonesia dalam hubungan politik dengan negara-negara tersebut dalam keadaan teratur dan baik. Artinya, baik Indonesia maupun negara mitra memiliki kepentingan politik yang stabil. Dapat dikatakan bahwa tidak ada sengketa politik baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dengan hubungan politik seperti itu, beban utang Indonesia yang besar berada dalam kondisi yang dapat dibayar secara bertahap tanpa harus mengganggu hubungan diplomatik. Artinya, setidaknya delapan negara yang meminjamkan uangnya tidak merasa terganggu dengan kinerja ekonomi dan politik Indonesia. Dengan pemerintahan yang stabil dari tahun 2014 hingga 2022, besaran utang dapat dipahami oleh negara mitra sebagai upaya membangun perekonomian. Indonesia juga dinilai mampu mengembalikan utang sesuai jadwal.

Hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat pada masa pemerintahan Jokowi ditandai dengan beberapa kerjasama di bidang ekonomi bahkan pendidikan (Wenas, 2020 dan Laksamana, 2018). Walaupun Indonesia terkena dampak dari Perang Dagang antara China dan Amerika Serikat, namun karena dampaknya yang terukur Indonesia tetap menjaga hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat. (Kristiadi, 2021). Pergantian pemerintahan dari Barack Obama, Donald Trump ke Joe Biden, dan hubungan bilateral kedua negara bisa dikatakan kurang campur tangan. Hal ini antara lain karena Washington masih menempatkan Indonesia pada posisi strategis di Asia. Kemitraan Komprehensif telah memperkuat hubungan antara Amerika Serikat dan Indonesia ini (Yerichielli, 2019).

Selain itu, hubungan bilateral Indonesia dengan Singapura stabil dan berkembang. Indonesia dan Singapura baru-baru ini menandatangani perjanjian pengelolaan wilayah udara (Kurnianingsih et.al, 2022). Demikian pula, Singapura menerima perjanjian ekstradisi bagi pelaku korupsi yang melarikan diri dari Indonesia ke negara tersebut (Desker, 2022). Hubungan Indonesia dengan Jepang dan Korea Selatan juga tumbuh karena hubungan perdagangan yang tinggi. Indonesia membuka pasar produk Jepang dan Korea Selatan mulai dari produk elektronik hingga otomotif Verico dan Riefky, 2022). Menurut Sari (2021), Indonesia dan Korea Selatan melanjutkan kerja sama di bidang pertahanan. Secara kuantitatif, volume perdagangan Indonesia dengan Korea Selatan dan Jepang masih tinggi (Rifki, 2021). Utang Indonesia yang sangat besar kepada kedua negara dapat dikatakan tidak mengganggu hubungan ekonomi dan politik kedua belah pihak.

Kedua, jika politik luar negeri Indonesia yang pertama menunjukkan kedekatan bahkan hubungan positif dengan negara-negara kreditor dan lembaga

bantuan, sikap Indonesia menghindari konfrontasi merupakan dampak kedua. Secara umum dapat dikatakan bahwa hubungan bilateral Indonesia dengan negara kredit relatif stabil. Hampir dapat dikatakan bahwa dalam kurun waktu 2014 hingga 2022 tidak ada konflik yang mengharuskan Indonesia berhadapan langsung dengan negara-negara tersebut. Hubungan diplomasi yang langgeng ini telah memberikan banyak peluang bagi Indonesia untuk fokus membangun pemerintahannya sehingga dapat melunasi utang hasil produktivitas antara lain karena pembangunan infrastruktur.

Indonesia, dalam beberapa tahun terakhir telah menjalankan kebijakan luar negeri dengan tidak membesar-besarkan masalah negara pemberi kredit. Misalnya, Indonesia dan China masih memiliki masalah perbatasan di Laut Natuna Utara. Indonesia mengklaim bahwa 200 mil laut pulaunya adalah Zona Ekonomi Eksklusif (Darmayadi dan Purnamasari, 2022). China mengkritisi kebijakan Indonesia tersebut, namun Indonesia tidak memberikan penegasan yang kuat dengan alasan antara lain menghindari konfrontasi di Laut China Selatan karena mempertahankan hubungan ekonomi yang membaik (Setiawan dan Noer Zaman, 2019).

Begitu juga Indonesia masih memiliki masalah perbatasan dengan Singapura. Dengan Amerika Serikat Indonesia mengalami dampak yang berat ketika AS dan China terlibat dalam perang dagang. Namun, Indonesia berusaha agar isu perdagangan luar negeri dengan Amerika Serikat tidak meluas menjadi isu hubungan bilateral.

Dampak ketiga adalah berkurangnya daya kritis Indonesia dalam menghadapi kreditur. Kebijakan luar negeri yang semula bebas dan aktif dalam mencapai kepentingan Indonesia mulai terbebani utang meski diklaim Indonesia dalam posisi sehat secara ekonomi.

Di sini dicatat bahwa dengan beban utang yang tinggi meskipun pemerintah mengklaimnya sebagai sesuatu yang wajar, ketergantungan Indonesia semakin besar pada negara-negara yang memberi bantuan. Akibatnya, hubungan luar negeri Indonesia tidak lagi kritis dalam hal-hal yang membutuhkan sikap mandiri, bebas, dan aktif dalam menciptakan perdamaian. Dalam kasus serangan Rusia ke Ukraina yang dibalas dengan bantuan militer Barat ke Ukraina di bawah pimpinan Amerika Serikat, Indonesia tidak secara tegas menyatakan sikap mengkritik langkah Barat mempersenjatai Ukraina. Indonesia tampaknya mengikuti wacana pro-Rusia tetapi tidak sampai mengkritik Barat (Dharmaputra, 2022).

Indonesia melakukan diplomasi perdamaian ke Ukraina dan Rusia dalam kapasitasnya sebagai ketua KTT G-20 di Bali (Nugraha et.al, 2022). Namun, diplomasi perdamaian tampaknya tidak berdampak kuat karena keterbatasan kapasitas Indonesia sebagai juru damai. Kapasitas Indonesia belum sepenuhnya kuat; namun, ketergantungan pada kreditor yang terlibat langsung dalam perang tidak memberikan daya dukung bagi tindakan Indonesia.

Dampak utang luar negeri terhadap kebijakan luar negeri Indonesia dapat dilihat dari meningkatnya utang luar negeri Indonesia ke China. Terlepas dari implikasi ekonominya, ketergantungan Indonesia yang semakin besar pada China

memiliki dampak politik yang mendalam. Karena Indonesia semakin bergantung pada China, melawan agresivitas China yang semakin meningkat di Laut China Selatan menjadi lebih sulit. Dilaporkan bahwa kapal-kapal penangkap ikan China sering melakukan pelanggaran di wilayah Indonesia di Laut China Selatan. Tetapi hubungan Indonesia dengan Cina telah mencegah Jakarta untuk bertindak aktif di Laut Cina Selatan kecuali siap kehilangan mitra dagang terbesarnya dan salah satu investor terbesarnya (Rakhmat, 2020).

Selain dari pihak Indonesia, terdapat tantangan dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri, dari pihak pemberi pinjaman, beberapa tuntutan mungkin muncul. Dengan Amerika Serikat mengingat utangnya mencapai USD 33 miliar, Washington dimungkinkan mendikte kerja sama, misalnya dalam penyediaan vaksin COVID-19 (Hakim, 2022).

Lebih lanjut, Hakim berargumen bahwa China bisa saja mendikte kerjasama dalam proyek infrastruktur seperti pada proyek perkeretaapian lainnya. Sedangkan dengan Singapura, Indonesia juga dapat bersandar ke Singapura dalam kerjasama di bidang-bidang strategis Indonesia seperti Batam dan banyak kerjasama lebih lanjut antara Indonesia dengan negara dan organisasi pemberi pinjaman asing.

Namun, meski utang Indonesia sudah sekitar Rp 7000 triliun dan dibayar melalui cicilan dan alokasi APBN yang ada, hingga saat ini mungkin belum ada tekanan yang berarti dari pihak luar. Artinya, Indonesia masih bisa bernegosiasi untuk mengalihkan sumber pendanaan lain jika dianggap sebagai sumber pendanaan yang saat ini dianggap mencampuri urusan dalam negeri. Sejauh ini Indonesia belum pernah mendengar besarnya tekanan dari IMF karena Jakarta bisa saja pindah ke sumber lain (Montratama, 2022).

Ciri-ciri politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dengan sikap tegas di dunia internasional sedikit tereduksi untuk tidak dikategorikan memudar. Hal ini juga secara tidak langsung dapat dikaitkan dengan fokus pembangunan Indonesia di negara dengan beban utang yang besar kepada negara-negara berpengaruh seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Jerman. Dalam beberapa penelitian, ketergantungan terhadap pihak asing dapat menyebabkan tidak lagi leluasa menjalankan kebijakan luar negerinya. Meski tidak ada larangan tertulis, namun sebagai negara dengan utang besar, ia tidak bisa lagi bebas memperjuangkan kepentingan nasionalnya secara tegas.

Namun Mulyana (2022) berpendapat bahwa sejak awal Indonesia menjamin bahwa penyaluran utang luar negeri tidak boleh berdampak langsung terhadap praktik pelaksanaan politik luar negeri Indonesia. Pemerintah Indonesia selama puluhan tahun menganut dan menerapkan politik luar negeri yang bebas aktif. Sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945, politik luar negeri aktif dan bebas telah dianut berdasarkan landasan konstitusional yaitu UUD 1945 yang tidak dapat dipisahkan dari tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 pada gugus kalimat.

Politik luar negeri yang tidak terikat dengan kekuatan asing dapat memberikan ruang bagi Indonesia untuk bermanuver politik luar negeri karena

tidak ada rasa ketergantungan (conversation.com 2020). Indonesia berutang kepada banyak negara, termasuk Amerika Serikat, China, Jepang, dan Singapura. Indonesia juga berutang kepada Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional. Dan di dunia di mana Rusia terlibat dalam konflik di Ukraina, China dan AS terlibat dalam konflik di Laut China Selatan, dan AS, Rusia, dan China semuanya terlibat dalam konflik di Timur Tengah, Indonesia perlu memperhatikan dengan bobot hutang luar negerinya sebelum melakukan politik luar negeri (okezone.com, 2022).

### Kesimpulan

Ketergantungan Indonesia terhadap utang luar negeri akan berdampak pada perilaku Indonesia dalam hubungan bilateral dan perilaku di dunia internasional. Berkaca pada pengalaman Sri Lanka dan Yunani, misalnya, besarnya utang membawa risiko besar bagi hubungan luar negeri. Utang pemerintah dan swasta yang sangat besar membuat Indonesia bergantung pada negara asing karena harus membayar utangnya dengan baik. Hutang yang sangat besar ini menyedot anggaran setiap tahunnya.

Dampaknya terhadap Indonesia jelas bahwa besarnya utang akan berdampak pada implementasi politik luar negeri Indonesia. Pertama, Indonesia menjaga hubungan luar negerinya secara positif dengan negara-negara kreditor. Hubungan bilateral dengan negara-negara kreditor berjalan lancar, bahkan di beberapa daerah semakin meningkat. Hubungan Indonesia dengan Singapura merupakan bukti hubungan bilateral yang positif.

Dampak kedua dari utang luar negeri yang besar dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri adalah kecenderungan untuk tidak menghadapi negara-negara kreditor meskipun menghadapi beberapa masalah. Yang paling terlihat adalah dengan China ketika Indonesia terlibat perselisihan dalam penetapan Laut Natuna Utara sebagai kawasan Zona Ekonomi Eksklusif. China tidak setuju dengan penetapan ZEE, tetapi Indonesia juga tidak melakukan kebijakan tegas.

Dampak ketiga utang luar negeri terhadap politik luar negeri adalah tidak adanya kebijakan yang tidak vokal dalam pelaksanaan politik luar negeri Indonesia di dunia internasional. Contoh yang terlihat adalah dalam upaya perdamaian perang di Ukraina, Indonesia tidak memberikan pandangan kritis terhadap Barat sehingga membuat perang semakin panjang dan kompleks.

Kemampuan Indonesia untuk membayar kembali utang luar negerinya setiap tahun sangat bergantung pada pengelolaan ekonomi dan politik dalam negeri. Dengan jumlah utang sebesar itu, risikonya besar jika pengelolaan utang luar negeri tidak terkendali, yang dalam bahasa pemerintah harus di bawah 60 persen produk domestik bruto. Selama ini pemerintah Indonesia berkali-kali menyatakan bahwa utang luar negeri tidak membahayakan ekonomi dan politik Indonesia karena masih bisa membayar cicilan bunga dan pokok.

## Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Jakarta yang telah memberikan bantuan untuk penelitian ini dengan nomor kontrak 324/R-UMJ/VI/2022 tanggal 24 Juni 2022.

## Referensi

- Balassa, B. (1985). The problem of the debt in developing countries. In *Change and Challenge in the World Economy* (pp. 102-127). Palgrave Macmillan: London.
- Boeije, Hennie. (2010). *Analysis in Qualitative Research*. Los Angeles: Sage.
- Chenery, H.B. and Strout, A.M. (1966) Foreign Assistance and Economic Development. *American Economic Review*, 56, 679-733.
- Catur, Wibowo. (2012). *Analysis Factors Affecting The Government of Indonesia's External Debt 1990-2009*. Thesis. Faculty of Economics, Sebelas Maret University, Surakarta.
- Colombo, E., & Longoni, E. (2009). The politics of external debt in developing countries. *University of Milan Department of Economics Working Paper Series*, 176, 1-22.
- Connelly, Aaron L. (2014). Indonesian Foreign Policy Under Presiden Jokowi. Lowly Institute for International Policy. Sydney: Australia.
- Creswell, John. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches*. Los Angeles: Sage.
- Darmayadi, A., & Purnamasari, E. N. (2022). Indonesia – China Relations in the Natuna Sea Dispute Resolution: Struggle for Sovereignty. *Journal of Eastern European and Central Asian Research*, 9(1), 41–48. <https://doi.org/10.15549/jeecar.v9i1.870>.
- Desker, B. (2022). *Singapore-Indonesia Ties: Renewed Deal for A New Age*. RSIS Commentary. No 007. 26 January 2022.
- Dietrich, Simone. (2021). *Countries, Markets, and Foreign Aid*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Donald E, Weatherbee (2016), Understanding Jokowi's Foreign Policy. Singapore: ISEAS.
- Gangte, Lammuaniam. (2020). The debt-trap diplomacy revisited: A case study on sri Lanka's hambantota port. *Artha Journal of Social Sciences*, 19(2), 53-66. doi:<https://doi.org/10.12724/ajss.53.4>.
- Gohar, M., and Butt, F. (2012). The Impact of External Debt Servicing on the growth of Low Income Countries, Sukkur Institute of Business Administration. In *Proceedings of 2nd International Conference on Business Management* (ISBN: 978-969-9368-06-6).

- Hey, J.A. (1993). Foreign Policy Options under Dependence: A Theoretical Evaluation with Evidence from Ecuador. *Journal of Latin American Studies*, 25, 543 - 574.
- Holsti, K.J. (1992). *International Politics: A Framework for Analysis*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- Ibrahim, S. G., Mato, K., & Wader, M. The Paradox Of Foreign Debt To Third World Nations In *International Politics: A Rationale For Perpetual Dependency*.
- Inkiriwang, F. W. (2020). The dynamic of the US–Indonesia defence relations: the 'IMET ban' period. *Australian Journal of International Affairs*, 74(4), 377-393.
- Jeanne A.K. Hey (1993). Foreign Policy Options under Dependence: A Theoretical Evaluation with Evidence from Ecuador. *Journal of Latin American Studies*. 25, pp 543-574 doi:10.1017/S0022216X00006660.
- Keohane and Joseph Nye. (1977). *Power and Interdependence: World Politics*. Boston: Little, Brown and Company.
- Kristiadi, R. (2021). The Effect of the China - United States Trade War on Indonesia's Trade Relations with the United States. *Journal of Politico*, 10(4).
- Kurnianingsih, F., Mahadiansar, M., & Adhayanto, O. (2022). Travel Corridor Arrangement Application Process by Governments of Indonesia and Singapore. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 14(2), 263-274.
- Lamont, Christopher. (2014). *Research Methods in International Relations*. London: Sage.
- Laksmana, E. (2018, October). Are military assistance programs important for US–Indonesia ties. *East Asia Forum*. (Vol. 2).
- Navalino, R. D. A. (2022). Military-Industrial Complex on Indonesian Defense Industry Cooperation–South Korea to Support The Defense Economy. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 5(3), 20905-20911.
- Nizamuddin, B. S., Wahyuni, S. S., Fakhruddin, F., & Fitriyani, F. (2022). The nexus between foreign exchange and external debt in Indonesia: evidence from linear and nonlinear ARDL approaches. *Journal of the Asia Pacific Economy*, 1-27.
- Nugraha, Ogi Nanda Raka Ade Candra, Arum Pramesti Wirawati Muhammad Erwan Syah, Danang Prasetyo, Frega Ferdinand Wenas Inkiriwang. (2022). Diplomatic Bluff against Indonesia's G20 Presidency amid the Ukraine - Russia Conflict: A View from Political Psychology. *Papua Journal of Diplomacy and International Relations*. Volume 2, Issue 2, November 2022 (123-141).
- Picard, Louis A and Robert Groelsema. (2015). US Foreign Aid Priorities: Goals for the Twenty-First Century. In *Foreign Aid and Foreign Policy Lessons for the Next Half-Century*. Edited by Louis A. Picard Robert Groelsem and Terry F. Buss. London: Routledge.

- Richardson, N. R. (1978). *Foreign policy and economic dependence*. University of Texas Press.
- Rifki, M. (2021). *Implementation Indonesia-Japan bilateral Relations After The Agreement Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement*. (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).
- Rafikasari, Astri. (2020). Redefining Indonesia's Foreign Policy Free & Active": Challenges & Opportunities of Indonesia's - China's Alliance in the Development of Space Technology. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, volume 510.
- Rosyidin, Mohamad. (2020). The Moment of a Rising Power: Indonesia's Foreign Policy Activism, 2004-2014. *Mandala: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*. Vol.4 No. 1.
- Santoso, Tommi Amin dan Christine Sri Marnani. (2020). Indonesia Defense Alliance Probability in the Free-Active Foreign Policy. *Technium Social Sciences Journal*. Vol. 12, 362-371
- Sitepu, V. M. (2021). The Effect of Foreign Direct Investment and External Debt on Economic Growth in Indonesia. *International Journal on Social Science, Economics and Art*, 11(2), 78-82.
- Sukma, Rizal (1997) Indonesia's bebas-aktif foreign policy and the 'security agreement' with Australia, *Australian Journal of International Affairs*, 51:2, 231-241, DOI: 10.1080/10357719708445212.
- Suzanne Groenewoud. (2022). Alliance with the Dragon? Greece and Portugal's re-orientation towards China after the sovereign debt crisis. Thesis. Universitat Pompeu Fabra. Barcelona.
- Rangkuty, D. M., & Hidayat, M. (2021). Does Foreign Debt have an Impact on Indonesia's Foreign Exchange Reserves?. *Ekuilibrium: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*, 16(1), 85-93.
- Rosenau, James N. (1976) The Study of Foreign Policy. Dalam *The World Politics: An Introduction*. James N. Rosenau, Kenneth W. Thompson dan Gavin Boyd. New York: The Free Press.
- Sari, M. I. (2021). Encouraging the Renegotiation Process between Indonesia and South Korea for the Continuation of the KFX/IFX Jet Fighter Cooperation Project.
- Setiawan, Asep and Endang Sulastri. (2017). *Pengantar Studi Politik Luar Negeri*. Jakarta: UMJ Press.
- Setiawan, Asep, Endang Sulastri, Sumarno. (2018). Model of Pro-People Foreign Policy as Indonesia's Response Toward Better Citizen Protection. *Central European Journal of International and Security Studies* 12, no. 4: 450-472.
- Setiawan, Asep and Ali Noer Zaman. (2019). *Diplomasi Maritim Indonesia: Dalam menjaga Kedaulatan Kepulauan Natuna 2014-2019*. Jakarta: UM Press.
- Simone Dietrich. (2021). *States, Markets, and Foreign Aid*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Verico, K., & Riefky, T. (2022). Bilateral Trade and Investment Relations Analysis: Indonesia and South Korea. *International Journal of Business and Society*, 23(2), 714-750.
- Wenas, Inkiriwang Frega. (2020). The dynamic of the US–Indonesia defence relations: the 'IMET ban' period. *Australian Journal of International Affairs*, 74(4), 377-393.
- Yerichielli, Y. (2019). Indonesia – Amerika dalam Kerangka Comprehensive Partnership. *Global Political Studies Journal*, 3(1), 90–109. <https://doi.org/10.34010/gpsjournal.v3i1.2006>

### Online

- Growing dependence on China is dangerous for Indonesia – what can be done?. Retrieved November 27, 2020). <https://theconversation.com/growing-dependence-on-china-is-dangerous-for-indonesia-what-can-be-done-150372>.
- Hardiantoro, Alinda. (2022). Reaching IDR 7,000 Trillion, Why Does Indonesia's Debt Continue to Rise? This is the Ministry of Finance's Explanation. Retrieved April 16, 2022. <https://www.kompas.com/tren/read/2022/04/16/160400465/tembus-rp-7.000-triliun-mengapa-utang-indonesia-terus-naik-ini-penjelasan?page=all>. Accessed September 1, 2022.
- Indonesia's External Debt in February 2022 Remains Under Control. Retrieved April 14. [https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp\\_2410322.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2410322.aspx).
- List of the 5 Largest Debtor Countries to Indonesia, The People Should Know. Retrieved January 18, 2022. <https://economy.okezone.com/read/2022/01/18/320/2533868/daftar-5-negara-pemberi-utang-terbesar-ke-indonesia-rakyat-harus-tahu>.
- Putri, Diva Lufiana. (2022). Daftar 10 Negara Pemberi Utang Terbesar ke Indonesia. Retrieved September 21, 2022. <https://www.kompas.com/tren/read/2022/09/21/120000965/daftar-10-negara-pemberi-utang-terbesar-ke-indonesia?page=all>.
- Rakhmat, Muhammad Zulfikar. (2020). *Growing dependence on China is dangerous for Indonesia – what can be done?* Retrieved November, 27. <https://theconversation.com/growing-dependence-on-china-is-dangerous-for-indonesia-what-can-be-done-150372>. Accessed September 1, 2022.
- Sri lanka: Sri lanka's foreign debt default: Why the island nation went under. (2022, Apr 15). Asia News Monitor Retrieved from <https://www.proquest.com/newspapers/sri-lanka-lankas-foreign-debt-default-why-island/docview/2650035516/se-2?accountid=25704>.



## Interview

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta

Dr. Luqman Hakim. 29 September 2022.

Dosen Hubungan Internasional Universitas Pertamina

Dr. Ian Montratama, 8 September 2022.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Dr. Jуда Agung, 26 Oktober 2022.

Kepala Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri (BSKLN)

Dr. Yayan GH Mulyana 20 October 2022.